

BAB II

KONDISI POLITIK DALAM NEGERI RRT

Bab II antara lain membahas situasi domestik RRT dan proses pengambilan keputusan. Setelah itu dilanjutkan dengan bahasan mengenai RRT sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

A. Situasi Domestik RRT dan Proses Pengambilan Keputusan

William D. Couplin menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri adalah 1. kondisi politik dalam negeri, 2. kemampuan ekonomi dan militer, dan 3. konteks internasional. Politik luar negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem ini bisa membentuk aspek-aspek luar negeri tertentu.

Akibat kondisi politik dalam negeri RRT yang aman, serta perekonomian dan militer yang baik, menyebabkan RRT memiliki stabilitas yang baik dibanding negara-negara lainnya. Karena stabilitas tersebut RRT mampu mengambil kebijakan politik luar negerinya, yang membuat RRT menjadi negara yang maju dan kuat pertahanannya.

1. Politik Domestik RRT

Dewasa ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sistem politik Republik Rakyat Tiongkok masih mempertahankan ideologi politik komunisme. Walaupun pada kenyataannya telah mulai menunjukkan liberalisasi pada banyak sektor kehidupan masyarakatnya. Bahkan, negara-negara komunis dewasa ini

menganggap Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara dengan sistem politik Republik Rakyat Tiongkok yang kapitalis karena dasar dari pemerintahannya yang tidak begitu jelas. Unsur Liberalisme Republik Rakyat Tiongkok di antaranya ditunjukkan melalui kebijakan yang menyerahkan sebagian kebijakan perekonomian terhadap swasta, dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah seperti halnya negara-negara penganut ideologi politik Komunisme.

Hal ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa Republik Rakyat Tiongkok merupakan bekas negara kekaisaran terbesar yang berdiri selama lebih dari 2000 tahun, sehingga unsur nilai-nilai masa lalu sangat melekat erat dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran komunis yang masih melekat hingga kini pada sistem pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok bukan lagi hal yang baru bagi masyarakatnya.

Sistem politik Republik Rakyat Tiongkok yang dinilai komunis justru dianggap menyimpang. Demokrasi rakyat sebagai bentuk khusus yang memenuhi fungsi diktator proletar di Republik Rakyat Tiongkok, justru dianggap mengalami penyimpangan dari bentuk Komunisme yang diajarkan Lenin di Uni Soviet maupun di Eropa.

Sejak awal pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 sampai 1976 di bawah kewenangan Mao Zedong, sistem politik Republik Rakyat Tiongkok tidaklah berjalan dengan mulus. Namun semenjak tahun 1982 di bawah kekuasaan Deng Xiaoping dicanangkan empat modernisasi (modernisasi pertanian, industri, pertahanan, dan iptek). Empat modernisasi yang dicanangkan Deng Xiaoping ini terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mencegah negara

ini dari keruntuhan, seperti negara-negara komunisme yang lain. Sistem politik Republik Rakyat Tiongkok pun tetap berjalan semestinya. Selain itu, faktor kemandirian Republik Rakyat Tiongkok yang tidak mau menjadi bawahan negara Uni Soviet pun yang menyebabkan negara ini bebas dari Leninisme yang kejam.

Secara konstitusi, Republik Rakyat Tiongkok ditetapkan dalam kongres rakyat nasional, yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal Partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Bentuk sistem politik domestik Republik Rakyat Tiongkok mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin

digunakan semenjak tahun 1949 dan berdasarkan ajaran ini sistem pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara didominasi oleh partai tunggal Republik Rakyat Tiongkok yaitu Partai Komunis China (*Chinese Communist Party*), partai inilah yang secara umum menjalankan pemerintahan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Lalu bagaimana dengan struktur institusi negara di Republik Rakyat Tiongkok. “*The main organs of state power are the National People's Congress (NPC), the State Council, and the President*”. Pengambil keputusan tertinggi ada pada *National People's Congress (NPC)*.

Kedudukan tertinggi ada pada *National People's Congress (NPC)* atau Kongres Rakyat Nasional, kongres yang diadakan satu tahun sekali ini. akan menentukan peraturan pemerintah, undang-undang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan negara yang diajukan dan juga memilih presiden dari Republik Rakyat Tiongkok. Presiden dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri, Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti yang dijelaskan oleh Ryser “*However, since the president usually holds other key positions within the state institutions and the CCP, the possesses immense power*”.

2. Proses Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terdapat 3 (tiga) model, yaitu: *The democratic model*; *pluralist model*; atau *ruling elite model*. *Ruling elite model* merupakan model pengambilan keputusan yang digunakan pada sistem politik domestik RRT. Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, mungkin juga aktor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.²⁴ Menurut William D. Coplin, elite adalah aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem politik domestik RRT, pengambil keputusan tertinggi ada pada *National People's Congress* (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional. Presiden dalam pemerintahan RRT menjadi sebagai kepala negara. Ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri dan presiden sekaligus menjadi Ketua Partai Komunis Kuo Mintang (Parantai Komunis Tunggal di RRT). Presiden melaksanakan amanat Kongres Rakyat Nasional termasuk didalamnya kegiatan pengambilan keputusan politik luar negeri. Pemimpin partai komunis Kuo Mintang menjalankan model *ruling elite* sekaligus aktor kepentingan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan luar negeri. Aktor adalah pelaku interaksi dalam menjalankan politik internasional. Keberadaan partai komunis Kuo Mintang sebagai elite model relatif cukup besar dan bersatu, menggunakan

²⁴ http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya, melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Para elite (aktor) dari partai Kuo Mintang hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan partai.²⁵

Badan eksekutif dari sistem politik Republik Rakyat Tiongkok dilakukan oleh *State Council* atau Dewan Negara yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada Kongres Rakyat Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara secara general. Dalam kaitannya dengan sistem politik domestik di Republik Rakyat Tiongkok, pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok berusaha untuk tetap mewujudkan “*One China*” satu kesatuan Republik Rakyat Tiongkok, bukan Republik Rakyat Tiongkok yang terpisah-pisah.

Republik Rakyat Tiongkok memiliki beberapa kebijakan lain yang sangat ketat, yaitu memberantas korupsi tanpa kenal ampun. Tahun-tahun belakangan ini lebih dari 3.000 pejabat Tiongkok telah dihukum karena menerima suap dan berbagai kesalahan lain, sebagian terkait paket stimulus Beijing sebesar 586 miliar dolar. Tindak korupsi itu terjadi antara Oktober 2009 hingga April tahun ini, dengan salah satu kasus terburuk melibatkan seorang pejabat yang menerima suap senilai 3,2 juta dolar, demikian kata Kementerian Pengawasan Republik Rakyat Tiongkok.

Contoh kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang lain adalah mengembangkan industri informasi dan elektronik yang menguasai pasar dunia yang melejitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang berideologi komunis telah berhasil mengadopsi semangat liberalisasi

²⁵ http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

ekonomi Barat dengan tepat, dengan tetap mempertahankan ideologi politik dan budayanya.

Sistem politik Republik Rakyat Tiongkok mampu membasmi korupsi. Salah satu keunggulan sistem politik Republik Rakyat Tiongkok adalah pemerintahnya begitu tegas menegakan hukum untuk siapapun yang terbukti bersalah di depan pengadilan. Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kejahatan korupsi. Siapaun yang terbukti syah melakukan tindakan korupsi, penyuapan dan penggelapan uang negara, diganjar hukuman mati, dengan tembakan. Keluarga tereksekusi harus menanggung biaya eksekusi dengan cara membeli peluru yang digunakan untuk menembak.

Terbukti hukuman berat terhadap tindakan korupsi, mampu membuat jera pelaku lainnya sehingga tingkat korupsi di Republik Rakyat Tiongkok sangat rendah. Memang hukuman berat seperti pada sistem politik Republik Rakyat Tiongkok bisa ditiru oleh Indonesia. Contoh negara maju seperti Republik Rakyat Tiongkok yang memberlakukan hukuman berat demi kemajuan dan martabat negara. Apapun alasannya yang namanya korupsi itu kejahatan yang sangat kejam dan biadab, efek korupsi mampu memiskinkan 100 orang, itu tanpa disadari oleh pelakunya. Kalau kejahatan ini dibiarkan, akan berdampak buruk bagi sebuah negara. Demikianlah sekilas tentang ringkasan sistem politik Republik Rakyat Tiongkok yang telah mengalami revolusi dari zaman kolosal menjadi sosialis komunis.

Prestasi perkembangan ekonomi dan sosial Republik Rakyat Tiongkok telah menarik perhatian dunia. Memasuki abad baru, Republik Rakyat Tiongkok penuh dengan pengharapan sekaligus tantangan-tantangan. Bersamaan dengan semakin dalamnya reformasi ekonomi serta implementasi kebijakan-kebijakan kendali makro, perekonomian Republik Rakyat Tiongkok telah memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan mantap yang baru. Terlepas dari semuanya ini, meluasnya serta berkembangnya korupsi sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian Republik Rakyat Tiongkok dan perkembangan sosialnya. Ini telah menjadi fokus perhatian semua orang, baik dalam maupun luar negeri, yang ingin melihat Republik Rakyat Tiongkok makmur dan stabil.²⁶

Pertama, banyaknya kasus korupsi menyangkut jumlah uang yang besar sekarang ini sungguh luar biasa. Di awal tahun 1980-an, suap biasanya melibatkan hanya beberapa ribu atau maksimal puluhan ribu renminbi. Di tahun 1990-an, unsur-unsur korup menjadi semakin tamak bersamaan dengan perkembangan ekonomi. Sementara gelombang perkembangan bangkit demikian juga perahu korupsi di atas gelombang ini. Sekarang seringkali terjadi kasus di mana suap mencakup jutaan atau puluhan juta renminbi. Kasus korupsi terbesar hingga saat ini melibatkan Rmb 150 juta.

Kedua, banyaknya calon-calon petinggi yang terlibat dalam korupsi juga telah meningkat. Di tahun 1980-an, kebanyakan kasus korupsi terjadi di tingkat setempat atau bawah. Setelah tahun 1980-an, jumlah pelanggaran baik hukum ekonomi maupun disiplin oleh calon-calon pemimpin meningkat dramatis. Di

²⁶ Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 73.

tahun 1999, 17 calon tingkat provinsi dan setingkat menteri (belum termasuk militer) diberikan tindakan disipliner dari dalam aparat Partai atas tuduhan korupsi. Layak juga dicatat bahwa selama tahun sebelumnya, korupsi tingkat tinggi melibatkan perlindungan yang diberikan kepada unsur-unsur kriminal atau menerima suap pasif (yaitu tidak agresif meminta suap), dalam jumlah yang tidak besar. Mantan Wakil Menteri Li Xiaoshi dari *State Science and Technology Commission* (Komisi Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Negara) merupakan salah satu contohnya.²⁷ Tetapi baru-baru ini, calon-calon petinggi yang telah dituduh secara aktif minta suap, mengambil inisiatif untuk memupuk kekayaan. Jumlahnya juga sekarang sangat tinggi. Umpamanya, jumlah yang digelapkan oleh Jing Deqin, mantan wakil pimpinan puncak dari *China International Trust and Investment Corporation*, antara lain, melibatkan puluhan juta renminbi. Unsur-unsur korup di antara calon-calon petinggi sekarang terungkap secara rutin. Ini mencerminkan tekad dan prestasi baik Partai maupun Pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi. Ini juga mengungkapkan sulitnya melaksanakan perlawanan terbuka terhadap korupsi.

Ketiga, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kelompok-kelompok terorganisasikan yang luar biasa besar mulai muncul. Suatu penyelundupan dan suap yang sangat besar di Kabupaten Zhangjiagang melibatkan lebih dari Rmb 10 milyar dalam korupsi dan Rmb 6 milyar dalam penggelapan pajak. Inilah yang disebut “korupsi kolektif,” suatu fenomena yang sekarang ini menimbulkan *shock* serta amukan nasional. Kasus ini melibatkan lebih dari 200 pejabat pemerintah,

²⁷ Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 74.

dengan 12 calon di tingkat kantor serta biro, dan 45 calon di tingkat divisi. Penyelundupan ini melibatkan rantai komando mulai dari baris depan petugas bea cukai, polisi perbatasan, inspektur komersil, dan urusan pelabuhan, sampai ke pemerintah kota serta Komite Partai, termasuk pemimpin-pemimpin tertinggi dalam *Zhangjiagang Communist Party Committee*. Ketika itu, media massa melaporkan bahwa kasus penyelundupan Zhangjiagang adalah kasus penyelundupan yang terbesar dalam sejarah, melibatkan jumlah dana terbesar, dan jumlah individu terbanyak di tingkat pemerintah maupun Partai termasuk pejabat peradilan dan penegakkan hukum semenjak pendirian negara ini. Baru-baru ini, sebuah kasus penyelundupan di Xiamen melibatkan jumlah dana yang lebih besar lagi dan jumlah calon maupun pemimpin yang lebih banyak lagi, menjadikan kasus Zhangjiagang itu tidak ada apa-apanya.²⁸

Keempat, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang hukum juga telah meningkat. Sementara usaha-usaha milik negara semakin aktif. Di saat yang sama, banyak yang merugi dan memberhentikan lebih banyak karyawannya. Ada banyak alasan yang melandasi meruginya usaha-usaha milik negara ini, antara lain yang paling penting adalah korupsi. Di antara kasus-kasus usaha yang sekarang ini sedang ditangani, setidaknya separuhnya melibatkan korupsi dan suap di antara para personil hukum perusahaan atau calon-calon pemimpin. Ulat-ulat ini menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan menghabiskan asset Negara seenaknya, membuat banyak orang terkejut.²⁹

²⁸ Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 75.

²⁹ Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 75.

Kelima, korupsi di sektor-sektor ekonomi sekarang sudah merambah ke bidang-bidang lainnya. Di Kota Luo Profinsi Guangxi, seorang wakil direktur penjara bernama Hu Yaoguang berkonspirasi dengan direktur rumahsakit penjara tersebut serta para kepala departemennya, maupun kepala peradilan dari pengadilan kriminal setempat, untuk secara kolektif menerima suap untuk membengkokkan hukum demi kepentingan pribadi serta keuntungan teman-teman dan sanak saudara dengan mengurangi hukuman serta masa percobaan terhadap lebih dari 60 kriminal. Begitu masalah ini diekspos, seluruh bangsa ini terkejut. Ada polisi yang bahkan berkonspirasi dengan kelompok-kelompok kriminal untuk memberikan payung perlindungan sementara personil-personil peradilan menerima suap untuk membengkokkan hukum. Selain itu, di dalam bidang urusan kepersonaliaanpun telah menjadi mode bagi para pejabat untuk mengejar promosi jabatan yang dapat diperjual-belikan.³⁰

Keenam, korupsi kekuasaan mulai berkembang dan meluas menjadi korupsi “professional.” Yaitu, personil air, listrik, serta jasa layanan publik lainnya, pengelolaan kota serta transportasi publik, dapat menggunakan keuntungan profesional mereka untuk “memakan, mengambil, menghentikan orang lain, dan mengajukan tuntutan.” Departemen pendidikan, yang dulu dianggap sebagai hal di luar jangkauan uang serta korupsi, menuntut pungutan dan mengorganisasikan pelajaran-pelajaran tak bernilai, hanya untuk mengumpulkan uang. Contoh lain adalah dalam posisi atau lembaga-lembaga yang seharusnya melayani produksi agri-kultur. Di sini, personilnya dapat

³⁰ *Ibid.*, hal. 76.

menahan jatah dan menaikkan harga pupuk kimiawi, pestisida, minyak diesel, dan produk agrikultur lainnya. “Memakan para petani, menghambat pekerjaan mereka, melukai mereka” telah menjadi pola pemerintahan di daerah-daerah pedesaan. Para pemimpin maupun calon, serta banyak pejabat tingkat manajemen, berpartisipasi dalam kegiatan korupsi profesional ini. Mereka-mereka yang berkuasaan besar menggunakannya terhadap mereka-mereka yang kecil kekuasaannya. Korupsi kekuasaan administratif pemerintahan telah merambah ke seluruh masyarakat, suatu kecenderungan yang berbahaya.³¹

Korupsi yang merajalela merusak perekonomian di mana usaha-usaha milik negara terus digerogoti, aset-aset Negara ditelan mentah-mentah. Unsur-unsur korup terutama tertarik membidik proyek investasi dan konstruksi Negara berskala besar. Banyak proyek konstruksi diadakan karena penggelapan, belum lagi proyek-proyek konstruksi yang ganda serta pemborosan. Korupsi telah menghancurkan lingkungan investasi Republik Rakyat Tiongkok, mempengaruhi investasi luar negeri. “Pungutan liar” maupun segala macam pungutan lainnya, hingga tingkatan yang berarti telah menghapuskan keuntungan berinvestasi di Republik Rakyat Tiongkok dalam benak para investor asing. Suap yang sudah umum telah menciptakan lingkungan persaingan yang tidak sehat, di mana permainan ketidak-teraturan ini membuat usahawan-usahawan terhormat yang ingin mengadakan bisnis yang pantas, langsung angkat kaki. Ketika pemerintah meminjamkan uang dalam jumlah besar ke luar negeri, pencucian uang

³¹ Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 76.

menyebabkan hilangnya puluhan milyar dolar dalam kebocoran modal di luar negeri.

Semuanya ini adalah efek-efek ekonomi. Secara politik, korupsi membuat kesan yang sangat buruk pada populasi. Kalau korupsi tak dapat dihentikan dalam jangka panjang, ini akan menggoyahkan kepercayaan orang-orang baik di Partai maupun pemerintah, menimbulkan pertentangan dan ketidak-selarasan.

Dari sudut ideologi dan kebudayaan, korupsi telah membingungkan nilai-nilai dan konsep-konsep tentang benar dan salah di benak rakyat. Pola berpikir sekarang ini adalah mementingkan diri sendiri, tindakan jangka pendek, mengurangi rasa kesatuan rakyat dan semangat berjuang bangsa. Oleh karenanya, korupsi yang merajalela telah menjadi masalah utama yang mempengaruhi serta menghambat proses reformasi, pengembangan perekonomian serta penstabilan masyarakat. Masalah kronis ini telah menjadi hambatan luar biasa besar bagi Republik Rakyat Tiongkok dalam merealisasikan sasaran-sasarannya untuk perkembangan di abad baru.³²

B. RRT Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk.³³

1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;

³² Laurence J. Brahm, *Cina's Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta, 2002, hal. 77.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
3. meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan
4. melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Perancis dan Rusia. Pada saat didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelima negara ini merupakan kekuatan utama Blok Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II. Kelima negara ini memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan masing-masing memiliki hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi di Dewan Keamanan, sekalipun disetujui oleh semua anggota lainnya. Kelima negara ini kadang disebut juga P5 (*P* dari kata *permanent* yang artinya "tetap").³⁴

Tiongkok akan meningkatkan keterlibatannya dalam misi penjaga perdamaian PBB, kata seorang pejabat senior dari Departemen Pertahanan Nasional Tiongkok. Pejabat itu mengatakan batalyon infanteri berkekuatan 700 personil yang akan dikirim ke Sudan Selatan menyelesaikan pelatihan baru-baru ini. Ini akan menjadi batalyon infanteri pertama Tiongkok untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian.

Pejabat itu juga mengatakan Tiongkok akan berbuat lebih banyak untuk mendukung misi penjaga perdamaian PBB di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan partisipasi dalam operasi penjaga

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Anggota_tetap_Dewan_Keamanan_PBB

perdamaian PBB berdasarkan permintaan PBB. Tiongkok sekarang adalah penyumbang dana terbesar keenam dari pasukan penjaga perdamaian PBB dan yang terbesar di antara negara-negara berkembang. Tiongkok juga merupakan penyumbang terbesar dari pasukan penjaga perdamaian di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan. Ia telah berpartisipasi dalam 24 misi perdamaian dan telah mengirimkan lebih dari 27.000 pasukan penjaga perdamaian. David Haeri, direktur kebijakan, evaluasi dan divisi pelatihan di departemen operasi penjaga perdamaian PBB dan dukungan lapangan, mengatakan PBB sangat berterima kasih atas dukungan Tiongkok untuk pemeliharaan perdamaian, dan bahwa sangat penting bagi Tiongkok untuk menjadi bagian dari itu.

"Ada dua alasan," kata Haeri.³⁵ "Pertama-tama, Tiongkok menambahkan kemampuan yang sangat signifikan seperti tentara profesional Tiongkok datang ke penjaga perdamaian." "Kedua adalah tentang sinyal politik," tambahnya. "Tiongkok adalah anggota tetap Dewan Keamanan unggul dalam hal kontribusi pasukan." "Ini mengirimkan sinyal yang kuat kepada pihak-pihak bahwa masyarakat internasional berada di belakang misi perdamaian ini. ... Jadi, ketika orang-orang lokal melihat pasukan Tiongkok di tanah mereka, mereka memahami bahwa Tiongkok adalah investasi perdamaian di negeri ini."³⁶

Politik luar negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem ini bisa membentuk aspek-aspek luar negeri tertentu.

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Anggota_tetap_Dewan_Keamanan_PBB

³⁶ <http://chindonews.blogspot.co.id/2014/10/china-akan-meningkatkan-peran-penjaga.html>

Akibat kondisi politik dalam negeri RRT yang aman, serta perekonomian dan militer yang baik, menyebabkan RRT memiliki stabilitas yang baik dibanding negara-negara lainnya. Karena stabilitas tersebut RRT mampu mengambil kebijakan politik luar negerinya, yang membuat RRT menjadi negara yang maju dan kuat pertahanannya. Tiongkok dengan kebijakan yang benar membuat negara tersebut menjadi aman dan sejahtera. Kondisi politik dalam negeri yang baik, perdagangan yang menguntungkan dan militer yang modern serta konteks internasional yang baik, Tiongkok mampu menjaga stabilitas situasi. Stabilitas ini mempengaruhi Tiongkok dalam mengambil keputusan termasuk didalamnya isu energi nuklir.